

**EFEK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN KOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 S/D 2017**

Fauzi Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
fauziwarman7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain lain pendapatan daerah yang sah dan SiLPA memberikan efek terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di kab/kota se provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 s/d 2017. Dalam penelitian ini sampel yang yang digunakan sama dengan populasi yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan data tabel Pendapatan Domestik Regional Bruto kab/kota se provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dari sumber data sekunder. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari *koefisien determinasi*, Uji F dan Uji T. Untuk uji variabel moderasinya menggunakan uji residual. Hasil penelitian ini dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji residualnya pertumbuhan ekonomi hanya memoderasi hubungan pendapatan dana perimbangan dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal, dan tidak memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain lain pendapatan daerah yang sah, SiLPA, pertumbuhan ekonomi

Abstract : *This study aims to determine the extent to which local revenue, balancing funds, and other legitimate regional revenues and SiLPA have an effect on the allocation of capital expenditure with economic growth as a moderating variable in districts / cities in Riau Islands province in 2010 until 2017. In this study the sample used is the same as the population, namely the report on the realization of the Regional Expenditure Budget for 2010 until 2017 taken from the Directorate General of Fiscal Balance and the table data on regency / city Gross Regional Domestic Revenue in the Riau Islands province from 2010 to 2017 taken from the Central Bureau of Statistics of the Riau Islands Province. Data collection techniques use the documentation method from secondary data sources. Prerequisite test for data analysis using normality test, multicollinearity test, heterocedasticity test, and autocorrelation test. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis consisting of coefficient of*

determination, F test and T test. To test the moderation variable using the residual test. The results of this study are that regional original income and balancing funds have a significant effect on the allocation of capital expenditures, while others are legitimate regional income, SiLPA and economic growth have an effect but not significant to the allocation of capital expenditure. The residual test results of economic growth only moderate the relationship between income from balance and SiLPA funds to the allocation of capital expenditure, and do not moderate the relationship of local revenue and other legitimate regional income to the allocation of capital expenditure.

Keywords: *Regional original income, balance funds, other income legitimate area, SiLPA, economic growth*

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya *desentralisasi* fiskal di Indonesia semenjak tahun 2001, dimana adanya pengalokasian dana dari pusat berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk daerah. Alokasi dana tersebut bermaksud untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, termasuk dalam penyediaan layanan publik yang memadai.

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perekonomian dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, dimana korelasinya PAD yang rendah maka alokasi belanja modal menjadi rendah, Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah belum digunakan secara efektif dan

efisien, dimana porsi pengalokasian belanja modal masih rendah dibandingkan belanja daerah lainnya, yang berakibat pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rendahnya pendapatan lain lain daerah yang sah tentunya berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Terjadinya defisit anggaran mengakibatkan harus digunakannya dana dari SILPA, sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan SILPA ditahun berikutnya yang berdampak terhadap rendahnya alokasi untuk belanja modal. Rendahnya Pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap menurunnya penerimaan daerah dan produktivitas perekonomian yang tentunya akan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Tabel 1
Alokasi Belanja Modal Se-Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau

No	Tahun	Total Belanja	Belanja Modal	Persentase Belanja
1	2010	Rp.6,865,662	Rp.1,883,195	27,43%
2	2011	Rp.8,374,316	Rp.1,552,043	18,53%
3	2012	Rp.9,109,437	Rp.1,602,642	17,53%
4	2013	Rp.10,355,345	Rp.2,173,344	20,99%
5	2014	Rp.11,351,570	Rp.2,539,569	22,37%
6	2015	Rp.9,436,708	Rp.1,662,441	17,52%
7	2016	Rp.10,519,891	Rp.1,962,837	18,66%
8	2017	Rp.11,114,803	Rp.2,082,251	18,73%

Data diolah dari Direktorat Jendral Perimbangan Kekayaan Negara RI (dalam jutaan rupiah).

Bedasarkan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Negara, untuk alokasi belanja daerah, porsi belanja pegawai dan belanja barang jasa masih besar dibandingkan pengalokasian belanja modal. Untuk tahun 2010 alokasi belanja modal 27,43% ditahun 2011 alokasi belanja modal hanya 18,53% sedangkan ditahun 2012 alokasi belanja modal turun menjadi 17,59% ditahun 2013 mngalami kenaikan 20,99% tahun 2014 juga mengalami kenaikan 22,37% tetapi kenaikan tidak terlalu signifikan, sedangkan ditahun 2015 turun lagi menjadi 17,62% ditahun 2016 mengalami kenaikan 18,66% dan ditahun 2017 naik lagi 18,73%. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap alokasi belanja modal yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Tentunya hal ini semua disebabkan oleh buruknya kinerja keungan daerah provinsi Kepulauan Riau sendiri dalam mengalokasikan dana yang ada, dan semua hal tersebut disebabkan juga karena tidak siapnya provinsi Kepulauan Riau dalam

menghadapi desentralisasi fiskal yang menyebabkan ketidakmampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal secara menyeluruh yang berdampak terhadap buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana kita ketahui salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa kita lihat dari seberapa banyak daerah tersebut mengalokasikan belanja modal.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efek masing masing variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu PAD, dana perimbangan, lain lain pendapatan daerah yang sah, SILPA dan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 s/d 2017, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik yang berkaitan tentang alokasi belanja daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Widiartini (2014 :28) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi Menurut Wulandari (2018:11) Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dimaksudkan kepada daerah untuk membiayai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah (Darise, 2009:43). Menurut Chabib, dkk (2010:67) Dana perimbangan terdiri atas: 1. Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA); 2. Dana Alokasi Umum (DAU); 3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Wulandari (2018:12) Lain lain Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain -lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat.

Menurut Putra (2018:235) sebagian besar SILPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung

menyentuh kebutuhan masyarakat. Sukirno (2010:423) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara suatu variable dengan variable yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan kausalitas (sebab akibat). Sedangkan kuantitatif adalah data berupa angka atau bilangan. (Ulum dan Juanda, 2016: 95).

Penelitian dilakukan dengan mengambil data yang laporan realisasi APBD yang dipublikasi di website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan data pertumbuhan penduduk yang diambil dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 s/d 2017

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel yang merupakan sumber data yang

sangat penting, populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 5 kabupaten, 2 Kota, dan provinsi Kepulauan Riau sendiri.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, jadi sampel yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan data tabel Pendapatan Domestik Regional Bruto kabupaten / kota dan data provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini bersumber dari dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan data tabel Pendapatan Domestik Nasional Bruto kabupaten / kota dan data provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 s/d 2017 yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh

mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2011: 105). Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Belanja Modal (Y) sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X3) SILPA (X4) dan variabel moderasi dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X5).

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LLPD	64	1,18	370,64	104,0605	74,43133
YS	64	-2,39	514,42	136,5855	120,23453
SILPA	64	52,17	759,49	241,8975	144,19460
BM	64	4,80	1094,79	270,4298	324,25961
PAD	64	184,64	2156,27	791,7813	362,17450
DP	64	1857,72	166111,36	34938,1598	47590,98087
PE	64				
Valid					
N	64				
(listwise)					
se)					

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Imam Ghozali, 2011: 160-165).

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,70939924
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,047
Test Statistic		,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai Kolmogorov-simirnov adalah 0,95 dengan nilai probabilitas (p) = 0,200 ($>0,05$). Hal ini membuktikan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	50,405	42,536		1,185	,241		
PAD	,283	,110	,637	2,581	,012	,127	7,854
DP	,176	,054	,443	3,286	,002	,427	2,342
LLPDYS	-,007	,241	-,003	-,028	,978	,501	1,998
SILPA	,059	,114	,049	,517	,607	,866	1,155
PE	-,001	,001	-,303	-1,312	,195	,146	6,872

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Hasil ini terlihat dari *Variance Inflation Factor (VIF)* juga terlihat bahwa kelima variabel memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan nilai absolute dan probabilitas signifikansi $> 0,05$ (Ghozali;2013), artinya dengan kata lain jika tingkat signifikasinya $> 0,05$ maka data tidak terkena Heterokedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34,161	24,674		1,384	,172
PAD	,159	,064	,762	2,499	,015
DP	,007	,031	,035	,213	,832
LLPDYS	-,118	,140	-,130	-,842	,403
SILPA	,059	,066	,105	,899	,373
PE	,000	,000	-,195	-,683	,497

Dependent Variable: ABS_RES_1

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23, 2019.

Hasil uji heteroskedastisitas seluruh variabel independen mempunyai signifikansi > 0,05. Dimana sig Pendapatan Asli daerah sebesar 0,15, sig Dana Perimbangan sebesar 0,832, sig Lain Lain Pendapatan daerah yang Sah 0,403, sig SiLPA 0,373 dan sig Pertumbuhan Ekonomi 0,497 Sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 6
Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,742 ^a	,550	,511	100,80124	1,544

a. Predictors: (Constant), PE, SILPA, LLPDYS, DP, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23,2019

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh angka DW sebesar 1.544. dalam tabel DW untuk k = 5 dan N = 64. Sedangkan nilai batas bawah (dl) sebesar 1.4322 dan nilai batas atas (du) sebesar 1.767. Nilai DW berada pada kondisi $4-du \leq d \leq 4-dl$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada pada daerah keragu-raguan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan uji tambahan, yaitu dengan melakukan Run Test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi

secara random atau tidak (sistematis). Adapun hasil output uji Run Test adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-14,17931
Cases < Test Value	32
Cases >= Test Value	32
Total Cases	64
Number of Runs	30
Z	-,756
Asymp. Sig. (2-tailed)	,450

a. Median

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23,2019

Hasil Output SPSS menunjukkan bahwa nilai test adalah -14,17931 dengan probabilitas 0,450; berada di atas signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Hipotesis

Terdapat tiga cara menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu: (1) uji interaksi, (2) uji nilai selisih mutlak, dan (3) uji residual. Dalam penelitian ini digunakan uji residual. Analisis residual ini menguji pengaruh deviasi dari suatu model dengan fokus lack of fit antar variabel independen (Ghozali, 2013:240). Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan regresi persamaan:

$$Z = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e..... (1)$$

Kemudian regresi dilanjutkan dengan persamaan:

$$|e| = a + b1Y \dots\dots\dots$$

(2)

Suatu variabel dikatakan sebagai variabel pemoderasi jika nilai sig < (*alpha*) 0.05 dan koefisien regresi bertanda negative (Ghozali, 2011:168).

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017

Tabel 8
Uji Residual Moderasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12563,689	3500,895		3,589	,001
BM	6,405	12,457	,065	,514	,609

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan hasil yang ditampilkan di tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel moderasi pada pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal karena bernilai positif (6,405) dan tidak signifikan (0,609) karena mempunyai nilai besar (>) dari 0,05.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017.

Tabel 9
Uji Residual Moderasi Terhadap Dana Perimbangan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13904,348	2310,791		6,017	,000
BM	-14,788	8,222	-,223	-1,799	,077

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan hasil yang ditampilkan di tabel 9 diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel moderasi pada dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal karena bernilai negatif (-14,788) tetapi tidak signifikan (0,77) karena mempunyai nilai besar (>) dari 0,05.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017

Tabel 10
Uji Residual Moderasi Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15480,874	5475,250		2,827	,006
BM	28,387	19,482	,182	1,457	,150

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan hasil yang ditampilkan di tabel 10 diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel moderasi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap alokasi belanja modal karena bernilai negatif (28,387) dan tidak signifikan (0,150) karena mempunyai nilai besar (>) dari 0,05.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017

Tabel 11
Uji Residual Moderasi SiLPA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6619,513	1849,319		3,579	,001
BM	-4,565	6,580	-,088	-,694	,490

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan hasil yang ditampilkan di tabel 11 diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai variabel moderasi pada SiLPA terhadap alokasi belanja modal karena bernilai negatif (-4,565) tetapi tidak signifikan (0,490) karena mempunyai nilai besar (>) dari 0,05.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016;96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 12
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	720569,705	5	144113,941	14,183	,000 ^b
Residual	589331,579	58	10160,889		
Total	1309901,284	63			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PE, SiLPA, LLLPDYS, DP, PAD

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Berdasarkan tabel 12 diatas, hasil uji F diperoleh F sebesar 14,183 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu < 0,05 yang berarti secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi memberikan efek positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Uji T (Uji Parsial)

Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat nilai tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan derajat bebas (n - k), dimana n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel. Dengan kriteria pengujian:

1. Apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 13
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	50,405	42,536		1,185	,241
PAD	,283	,110	,637	2,581	,012
DP	,176	,054	,443	3,286	,002
LLPDYS	-,007	,241	-,003	-,028	,978
SILPA	,059	,114	,049	,517	,607
PE	-,001	,001	-,303	-	,195
				1,312	

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS23, 2019

Pendapatan Asli Daerah Memberikan Efek Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017

Hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal, pada tabel 13 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,581 dan nilai signifikan sebesar 0.012. Hasil Pengukuran menunjukkan nilai t hitung (2,581) lebih besar dari 1.96 (t tabel) dan nilai signifikan (0,012) lebih kecil dari 0.05 maka dengan ini hipotesis pertama diterima, dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah memberikan efek positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Tahun 2010 s/d 2017.

Dana Perimbangan Memberikan Efek Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017;

Hubungan antara dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal, pada tabel 13

menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,286 dan nilai signifikan sebesar 0.002. Hasil Pengukuran menunjukkan nilai t hitung (3,286) lebih besar dari 1.96 (t tabel) dan nilai signifikan (0,002) lebih kecil dari 0.05 maka dengan ini hipotesis kedua diterima, dan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memberikan efek positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Tahun 2010 s/d 2017.

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Memberikan Efek Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017;

Hubungan antara Lain-Lain pendapatan daerah yang sah terhadap alokasi belanja modal, pada tabel 13 menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,28 dan nilai signifikan sebesar 0.978. Hasil Pengukuran menunjukkan nilai t hitung (-0,28) lebih kecil dari 1.96 (t tabel) dan nilai signifikan (0,978) lebih besar dari 0.05 maka dengan ini hipotesis ketiga ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa Lain-Lain pendapatan daerah yang sah tidak memberikan efek positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Tahun 2010 s/d 2017.

SILPA Memberikan Efek Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017;

Hubungan antara SiLPA terhadap alokasi belanja modal, pada tabel 13 menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,527 dan nilai signifikan sebesar 0.607. Hasil Pengukuran

menunjukkan nilai t hitung (0,527) lebih kecil dari 1.96 (t tabel) dan nilai signifikan (0,607) lebih besar dari 0.05 maka dengan ini hipotesis keempat ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak memberikan efek positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Tahun 2010 s/d 2017

Pertumbuhan Ekonomi Memberikan Efek Positif Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017;

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal, pada tabel 13 menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,312 dan nilai signifikan sebesar 0.195. Hasil Pengukuran menunjukkan nilai t hitung (-1,312) lebih kecil dari 1.96 (t tabel) dan nilai signifikan (0,195) lebih besar dari 0.05 maka dengan ini hipotesis kelima ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak memberikan efek positif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Tahun 2010 s/d 2017.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Tabel 14
Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,742 ^a	,550	,511	100,80124

a. Predictors: (Constant), PE, SILPA, LLPDYS, DP, PAD

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 14 diatas, menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R² adalah 0,511. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi menerangkan variabel independen yaitu Belanja Modal sebesar 51,1% sedangkan sisanya sebesar 48,9% diterangkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.

4. SiLPA berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
5. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
6. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
7. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi tetapi tidak signifikan hubungan antara Dana Perimbangan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
8. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.
9. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi tetapi tidak signifikan hubungan antara SiLPA terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 s/d 2017.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini

1. Untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, sehingga mengurangi transfer Dana

Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerahnya adalah bukti bahwa pemerintah daerah tersebut telah melakukan desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota daerah itu sendiri.

2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap SiLPA yang dihasilkan oleh masing masing kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, apakah SiLPA tersebut dihasilkan oleh efektifnya penerimaan PAD dan dibarengi dengan efisiensi belanja daerah atau dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, ini dikarenakan SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat salah satunya dengan mengalokasikan kedalam belanja modal.
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan PAD, Dana Perimbangan, Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah dan SiLPA dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N., 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Ghozali, I., 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., 2013. *Analisis multivariate program*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Ghozali, I., 2016. *Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 (edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.
- Putra, W., 2018. *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachim, A., 2015. *Barometer Keuangan Negara*. Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta, 55281.
- Sukirno, S., 2004. *Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soleh, C. and Rohmansjah, H., 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Juanda, A. and Ulum, I., 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi Klinik Skripsi*.
- Widiartini, K., 2014. *Otonomi Daerah Bali*: Universitas Pendidikan Ganesha
- Wulandari, P.A. and Iryanie, E., 2018. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.